



KAP SUKRISNO SARWOKO & SANDJAJA



Kick-off Meeting EITI 2012-2013

Agenda

1. Pendahuluan
2. Rencana Kerja
3. Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*)
4. Draft Inception Report
5. Rekonsiliasi dan Format Pelaporan
6. Informasi Kontekstual - Usulan dan Potensi Permasalahan
7. Diskusi

Pendahuluan

Tujuan penugasan IA sesuai dengan “TOR” adalah membuat laporan keterbukaan informasi (transparansi) dan yang dpt dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) mengenai industri ekstraktif di Indonesia atau implementasi “EITI” di Indonesia tahun 2012&2013

Laporan EITI tersebut (sesuai dengan ISA-ISRS # 4400) akan menjadi dokumen publik, yang dapat diakses setiap WNI dan semua warga negara dunia

Laporan akan mencakup (1) contextual information mengenai Extractive Industry di Indonesia, dan (2) Reconciliation Report mengenai pembayaran/penerimaan yang berjumlah material dari pihak perusahaan-perusahaan Extractive Industry & Pemerintah

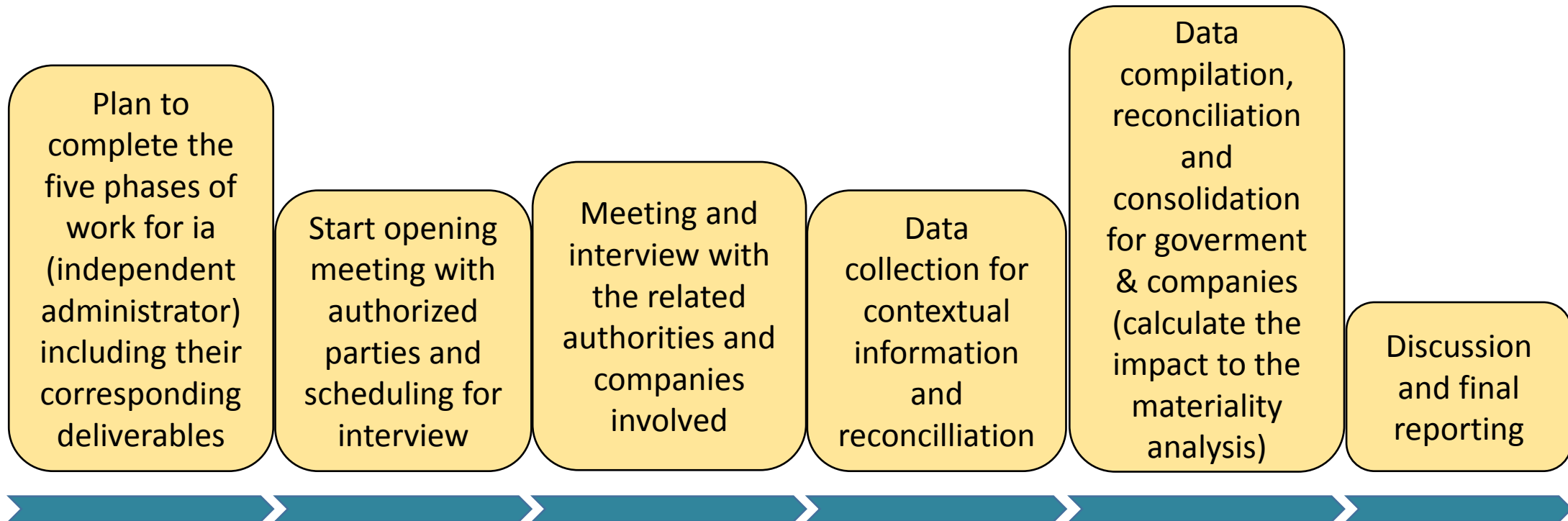
Laporan “EITI” ini akan digunakan untuk menambah pengetahuan WNI tentang Extractive Industri, serta mengundang perhatian pembaca-pembaca kritis dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya alam di Indonesia

Rencana Kerja

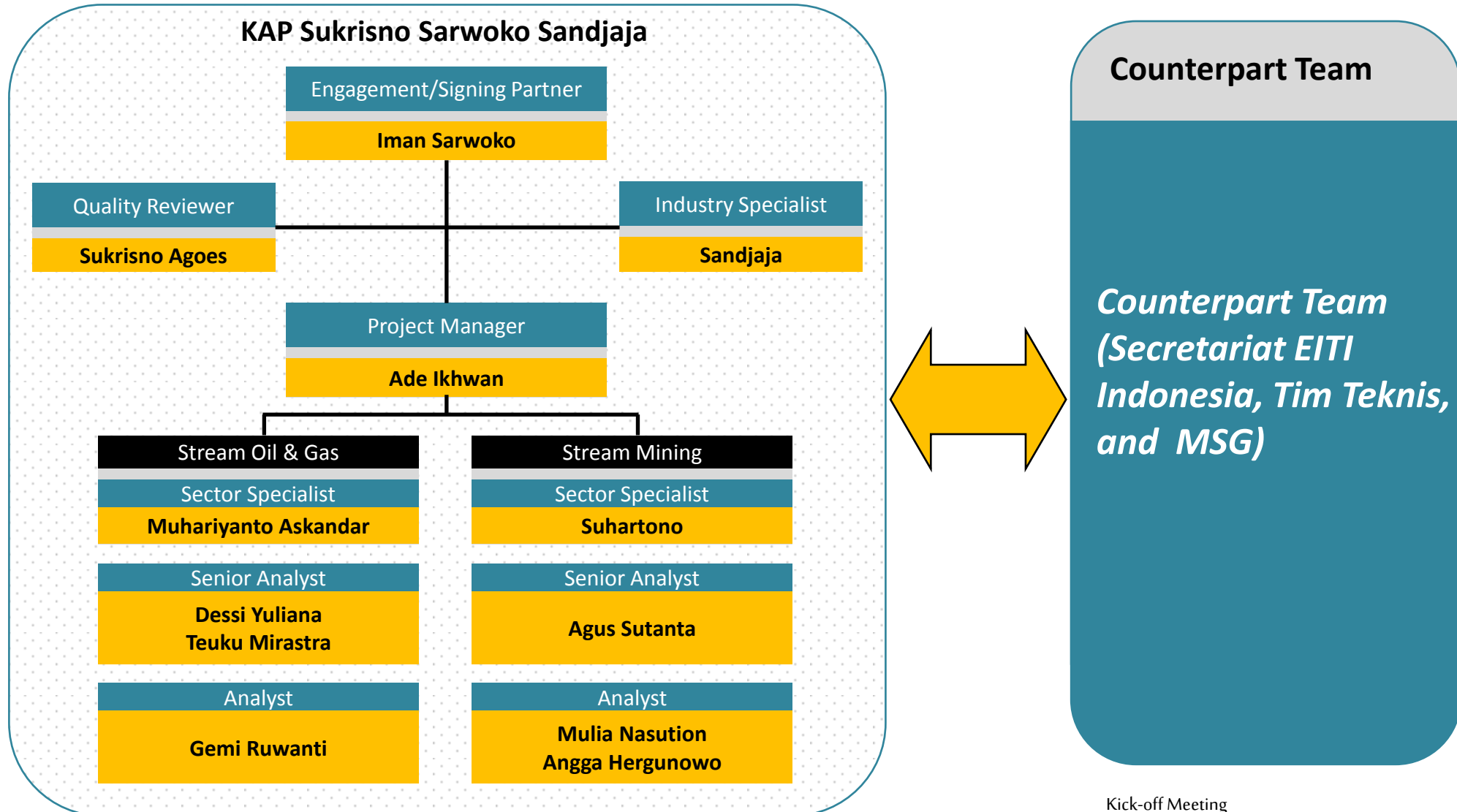
No	Deliverables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
P1	Kick off & Planning																							1
	Inception Report																							3
	Observation & Recommendation																							3
	Draft of Reporting Template																							1
	List of Analysis and mitigation plan																							11
	List of PIC																							3
P2	Submission of Reporting Template																							1
	List of control status																							22
	Workshop																							1
	Progress Meeting																							2
	Procedures and approach																							3
	Preparation of contextual report																							14
P3	Reconciliation Process																							13
P4	Investigation of Discrepancies																							14
P5	Submission Draft Report to Secretariat																							1
	Submission Draft Report to MSG																							1
	Final Contextual Report																							6
	Observation & Recommendation																							6
	Review on the report																							6
	Final MSG approval																							1

Rencana Kerja

Approach and Methodology

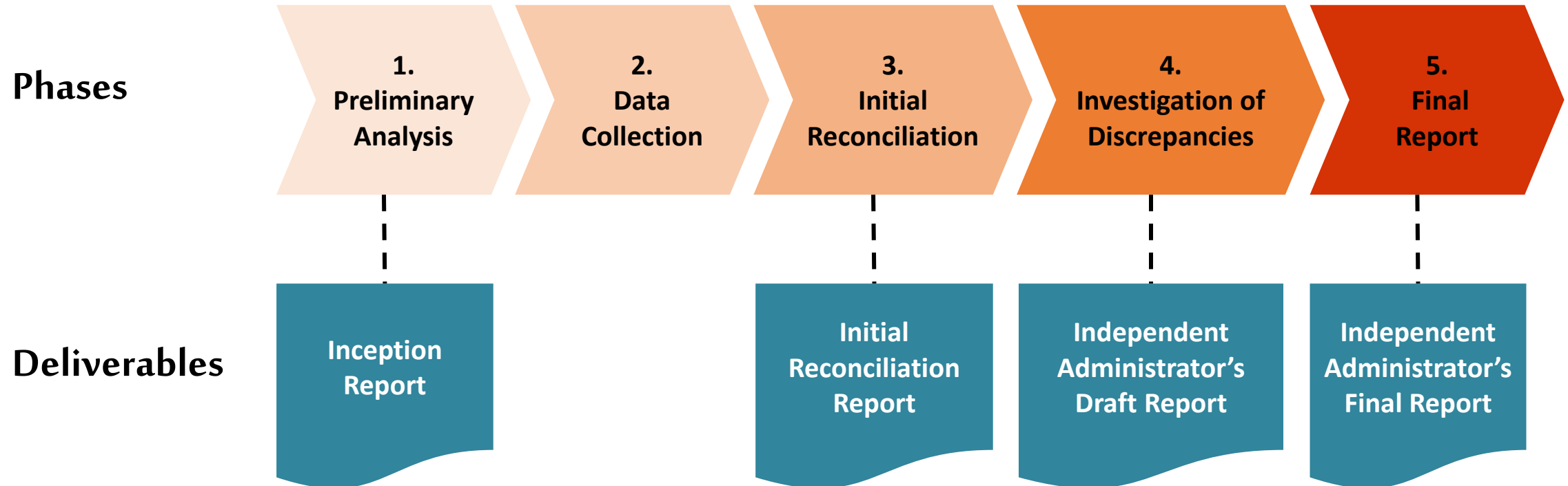


Rencana Kerja



Prosedur Yang Disepakati

Sesuai dengan Term of Reference (TOR)



Draft Inception Report

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang
 - Latar belakang yang mencakup informasi tentang tata kelola dan kebijakan perpajakan yang mengatur industri ekstraktif (TOR 1.1)
3. Analisa Informasi Kontekstual
 - Analisa informasi kontekstual dan informasi bukan pendapatan lainnya (TOR 1.2)
4. Ruang Lingkup Rekonsiliasi
 - Ruang lingkup jenis pendapatan dan penerimaan yang dilaporkan dalam laporan EITI sesuai dengan standar EITI 4.1 (TOR 1.3)
 - Ruang lingkup perusahaan pelapor dan lembaga pemerintahan pelapor sesuai dengan standar EITI 4.2 (TOR 1.4)
5. Pendekatan dan Metodologi
 - Usulan format formulir pelaporan (TOR 1.5)
 - Prosedur audit perusahaan pelapor dan lembaga pemerintahan yang terkait (TOR 1.6)
 - Saran kepada Tim Transparansi untuk permasalahan kredibilitas data yang digunakan dalam laporan EITI (TOR 1.7)
 - Usulan mengenai prosedur keamanan data yang rahasia (TOR 1.8)
6. Permasalahan dan Rekomendasi
 - Permasalahan dan rekomendasi (TOR 1.9)

Rekonsiliasi dan Format Pelaporan

Materialitas dan Jumlah Entitas Pelapor

- Tingkat materialitas sesuai dengan Scoping Study EY dan telah dibahas dan disepakati bersama Tim Transparansi. Penerimaan negara yang lebih dari 1% dari total penerimaan dari masing-masing sektor industri ekstraktif dianggap sebagai penerimaan yang material.
- Jumlah entitas pelapor yang menjadi cakupan rekonsiliasi menurut scoping study EY yang akan diverifikasi oleh IA sebagai berikut:

Migas	: Operator	= 67 (2012) & 72 (2013)
	Non Operator	= 81 (2012) & 85 (2013)
	Instansi Pemerintah	= 3
Minerba	: Perusahaan	= 76 (2012) & 99 (2013)
	Instansi Pemerintah	= 3

Rekonsiliasi dan Format Pelaporan

No	Issue	EITI Standard
1	Representation Letter for Agreed Upon Procedures	
2	Other Reconciliation Scope:	
	The coverage of infrastructure provisions and barter arrangements	4.1.d
	The coverage of social expenditures	4.1.e
	The coverage of transportation revenues	4.1.f
3	Level of Disaggregation at project level consistent with the US SEC and European Union	5.2.e

Rekonsiliasi dan Format Pelaporan

MIGAS



- Pada template pelaporan Operator dan Non Operator: penggabungan pembayaran untuk Corporate dan Dividend Tax
- Pada template pelaporan SKK Migas: penambahan tabel untuk Over/Under Lifting dalam volume (in-kind)
- Fleksibilitas template isian untuk pembayaran dan penerimaan atas DMO Fee dan Corporate dan Dividend Tax
- Penambahan table CSR pada format pelaporan

Rekonsiliasi dan Format Pelaporan

MINERBA



- Baris “sales revenue share” agar dihapus kecuali ditujukan kepada perusahaan batubara yang memiliki kontrak PKP2B. (Tabel B-Mining Reporting Template)
- Untuk perusahaan dengan kontrak PKP2B perlu ditambahkan table ikhtisar “sales revenue share” pada table bagian F. (Tabel B-Mining Reporting Template)
- Pengisian detail pembayaran pajak penghasilan, sebaiknya kolom tax period tidak disertakan mengingat konsep rekonsiliasi adalah cash basis. Kolom month bias diganti dengan kata “paid in” untuk menegaskan konsep cash basis yang digunakan. (Tabel F3-Mining Reporting Template)
- Pada seluruh tabel, kolom amount dipisahkan dalam jumlah kolom USD & kolom IDR dan ditambahkan baris total

Contextual Report

Ketentuan EITI nomor 3 mengharuskan informasi-informasi berikut ini ada dalam informasi kontekstual:

- Kerangka hukum dan kebijakan fiskal yang mengatur industri ekstraktif (3.2)
- Gambaran industri ekstraktif (3.3)
- Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian (3.4)
- Data produksi (3.5)
- Partisipasi negara dalam industri ekstraktif (3.6)
- Alokasi pendapatan dan pendapatan berkelanjutan (3.7-3.8)
- *Lincence register and licence allocation* (3.9-3.10)
- Kebijakan pemerintah dalam hal yang terkait dengan *beneficial ownership* (3.11) dan kontrak (3.12)

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.2.b	Where the government is undertaking reforms, the multi-stakeholder group is encouraged to ensure that these are documented in the EITI Report.	<p>Usulan : Pembahasan mengenai rencana amendemen Undang-Undang 22/2001 tentang minyak dan gas bumi.</p> <p>Jika disetujui, IA mengharapkan bantuan Tim Transparansi (MSG) untuk memberikan rekomendasi dalam mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut dan mendapatkan naskah Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang baru dari Kementerian yang terkait.</p>
3.4.a	Size of the extractive industries in absolute terms and as a percentage of GDP, including an estimate of <u>informal sector activity</u> .	<p>Potensi Permasalahan: Referensi/informasi mengenai angka kontribusi dari aktifitas sektor informal akan sulit didapat.</p> <p>Scoping Study EY juga mencatat bahwa data sektor informal ini tidak tersedia.</p>
3.5.a	The EITI Report must disclose total production volumes and <u>the value</u> of production by commodity, and, <u>when relevant, by state/region</u>	<p>Potensi permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga masing-masing komoditas tidak dipublikasikan secara resmi oleh lembaga pemerintah. • Angka produksi yang dilaporkan lembaga pemerintah (BPS, Ditjen minerba, Dijen migas) mungkin berbeda termasuk data-data per daerah. <p>IA akan mendiskusikan hal ini lebih lanjut bersama Tim Transparansi.</p>

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.8.a	A description of any extractive revenues earmarked for specific programmes or geographic regions. This should include a description of the methods for ensuring accountability and efficiency in their use	<p>Potensi Permasalahan: IA memerlukan rekomendasi Tim Transparansi (MSG) untuk mengkonfirmasi ke Bapenas atau Depkeu mengenai kemungkinan adanya pendapatan dari industri ekstraktif yang diperuntukan khusus untuk program tertentu atau daerah tertentu dan untuk mendapatkan akses ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).</p> <p>Scoping Study EY (hal. 10) tidak bisa mengidentifikasi adanya alokasi dana yang dimaksudkan oleh standar ini.</p> <p>Usulan : IA dapat membahas tentang alokasi tambahan dana bagi hasil dari migas untuk Aceh dan Papua.</p>

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.9.b	Implementing countries are required to maintain a publicly available register or cadastre system(s) with the following timely and comprehensive information regarding each of the licenses pertaining to companies covered in the EITI Report: i. license holder(s); ii. coordinates of the license area; iii. date of application, date of award and duration of the license; and iv. in the case of production licenses, the commodity being produced.	<p>Potensi Permasalahan: Detail informasi mengenai masing-masing lisensi secara lengkap atau cadastre system tidak tersedia secara lengkap di publik.</p> <p>Berikut catatan dalam Scoping Study EY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migas – Informasi untuk wilayah kerja tersedia di laporan SKK Migas tapi tidak tersedia mengenai informasi tentang koordinat, cadangan, dan komoditas untuk setiap WK. (hal. 17) • Minerba – cadastral information dapat dibeli dari Dijen Minerba (hal 25) <p>IA tidak menemukan adanya peraturan yang mengatur pengungkapan informasi seperti yang ditentukan oleh standar EITI ini.</p>

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.10.a	Implementing countries are required to disclose information related to the award or transfer of licenses pertaining to the companies covered in the EITI Report, including: a description of the process for transferring or awarding the license; the technical and financial criteria used; information about the recipient(s) of the license that has been transferred or awarded, including consortium members where applicable; and any non-trivial deviations from the applicable legal and regulatory framework governing license transfers and awards.	Potensi Permasalahan: informasi mengenai perpindahan lisensi akan sulit ditemukan.

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.10.b	Where licenses are awarded through a bidding process <u>during the accounting period</u> covered by the EITI Report, the government is required to disclose the <u>list of applicants and the bid criteria</u> .	IA akan meminta data dan konfirmasi ke Dirjen Migas dan Dirjen minerba mengenai adanya proses tender untuk kontrak migas dan pertambangan pada tahun 2012-2013, kriteria tender, dan daftar pemohonnya Potensi Permasalahan: informasi mengenai daftar pemohon bidding biasanya tidak dipublikasikan
3.10.d	The multi-stakeholder group may wish to include additional information on the allocation of licenses in the EITI Report, including commentary on the efficiency and effectiveness of these systems	Pembahasan: IA akan mendiskusikan dengan Tim Transparansi mengenai komentar Tim Transparansi seperti yang diisyatkan standar EITI poin 3.10.d

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.11.a	It is <u>recommended</u> that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s) and the level of ownership. Where this information is already publicly available, e.g. through filing to corporate regulators and stock exchanges, the EITI Report should include guidance on how to access this information.	<p>Potensi Permasalahan: informasi mengenai <i>beneficial ownership</i> sangat terbatas, terutama bagi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek.</p> <p>Scoping Study yang disusun oleh EY (hal 17) juga mencatat kesulitan untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai ultimate beneficial owner.</p>
3.11.b	Where such registers do not exist or are incomplete, it is recommended that implementing countries request companies participating in the EITI process provide this information for inclusion in the EITI Report EITI. <i>At the 22nd EITI Board meeting, it was agreed that the EITI will in the future require disclosure of beneficial ownership.</i>	<p>Usulan: IA akan mendiskusikan lebih lanjut bersama MSG apakah saat ini pertanyaan <i>beneficial ownership</i> diperlukan untuk dimasukkan dalam <i>reporting template</i>. IA mencatat bahwa syarat ini masih merupakan rekomendasi. Akan tetapi, kami mencatat adanya kemungkinan di periode yang akan datang, EITI board akan mensyaratkan pelaporan <i>beneficial ownership</i>.</p>

Usulan dan Potensi Permasalahan

Contextual Report

Requirement Number:	EITI Requirement	Komentar IA
3.12.a	Implementing countries <u>are encouraged</u> to publicly disclose any contracts and licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals.	Potensi Permasalahan: informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak biasanya tidak dipublikasikan kecuali untuk perusahaan-perusahaan publik. Beberapa ketentuan kontrak dalam kontrak migas dapat diperoleh
Lain-lain IA Memerlukan rekomendasi dari MSG untuk mendapatkan data tambahan atau konfirmasi dari institusi terkait, misalnya mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan eksplorasi yang signifikan baik untuk migas dan pertambangan mineral kepada Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – EITI 3.3 • Peta konsentrasi produksi batubara dan mineral lainnya kepada Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – EITI 3.4.e • Peta konsentrasi produksi minyak dan gas bumi kepada Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – EITI 3.4.e • Adanya proses tender untuk kontrak migas dan pertambangan pada tahun 2012-2013, kriteria tender, dan daftar pemohonnya kepada Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – EITI 3.10.b • Sumber referensi harga agar dapat diskusikan dan disetujui terlebih dahulu oleh MSG – EITI 3.5.a • Data produksi masing-masing komoditas per daerah kepada Ditjen Migas dan Ditjen Minerba atau BPS – EITI 3.5.a • Data ekspor masing-masing komoditas dalam volume dan nilai per daerah kepada Ditjen Migas dan Ditjen Minerba atau BPS - EITI 3.5.b • Sumber Informasi mengenai estimasi produksi, harga dan estimasi pendapatan dari industri ekstraktif yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah - EITI 3.8.c 		

Usulan Outline Contextual Report (Tentative)

- 1. Overview of Extractive Industries**
- 2. Legal Framework Governing the Extractive Industry and Transparency**
- 3. Licensing Processes**
- 4. Subnational Payments**
- 5. State-Owned Extractive Enterprises**
- 6. Procedures for Obtaining Permits**
- 7. Social Expenditures**
- 8. Budget Process and Revenue Management**
- 9. Ongoing Reforms in the Extractive Sector**

Diskusi